



## Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaera Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor

<sup>1</sup>Omar Dision Tuaty

<sup>1</sup> Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi, Universitas Tribuana Kalabahi

---

### Abstract

Received: 19 Agustus 2023  
Revised: 20 September 2023  
Accepted: 27 September 2023

*Welfare according to language is safe, secure and prosperous, so that welfare includes security, safety and prosperity. In general terms, prosperity refers to a state of well-being, a human condition in which people are prosperous, in good health and at peace. According to Soetomo, the level of community welfare contains three indicators, namely: Social Justice, Economic Justice and Democratic Justice. Social Justice, namely justice that is evenly distributed to all people which includes: education, electricity and water. This study aims to determine the Effect of Financial Management Accountability Allocation of Village Funds, Village Policies and Village Institutions on Community Welfare in Kaera Village, Pantar Timur District, Alor District, both partially and simultaneously. Respondents of this study amounted to 76 people. This type of research is field research and is quantitative, using a questionnaire as a data collection instrument. The data was then analyzed using the t-test to determine the partial effect and the F-test to determine the simultaneous effect on people's welfare with the results of the study as follows: 1. Financial management accountability variable for village fund allocation, village policies, village institutions and community welfare has a Pearson product moment correlation value above the limit of 0.3 for the validity test. 2. The financial management accountability variable for village fund allocation, village policies, village institutions and community welfare has a Cronbach alpha value above the limit of 0.6 for the reliability test. 3. The financial management accountability variable for village fund allocation, village policies, village institutions and community welfare has a test value for each classic assumption test that is above alpha and passes the classic assumption test. 4. There is no effect of Financial Management Accountability Allocation of Village Funds partially does not affect Community Welfare as evidenced by the sig t test value of 0.623, which is greater than the research alpha value of 5% (0.05). 5. There is an influence of Village Policy on Community Welfare, as evidenced by the sig t test value of 0.013, which is smaller than the research alpha value of 5% (0.05). 6. There is an influence of Village Institutions on Community Welfare, as evidenced by the sig t test value of 0.019, which is smaller than the research alpha value of 5% (0.05). 7. There is an influence of Financial Management Accountability Allocation of Village Funds, Village Policies and Village Institutions on Community Welfare as evidenced by the sig F test value of 0.016 which is smaller than the research alpha value of 5% (0.05). From the results of the research and the conclusions of the research, the research team suggested to the village government respondents that in the future they should embrace the village community more and expand the opportunities for the community to convey their aspirations, besides that the village government also needs to implement policies that are beneficial to the village community. On the other hand, the research team also suggested that respondents from the Kaera Village community, Pantar Timur District, Alor Regency, should participate in realizing society by creating a law-abiding, tolerant, just society and providing participation in*

---

---

*providing advice to improve the welfare of the general public in the village.*

**Keywords:** *Accountability of Financial Management Allocation of Village Funds, Village Policy, Village Institutions and Community Welfare*

(\*) Corresponding Author: [omartuaty@gmail.com](mailto:omartuaty@gmail.com)

**How to Cite:** Tuaty, O. D. (2023). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaera Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8413736>.

---

## PENDAHULUAN

Kesejahteraan menurut bahasa adalah aman, sentosa dan makmur, sehingga kesejahteraan meliputi keamanan, keselamatan dan kemakmuran. Dalam istilah umum, sejahtera menunjuk ke keadaan yang baik, kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai. Tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut menurut Soetomo mengandung tiga indikator yaitu: Keadilan Sosial, Keadilan Ekonomi dan Keadilan Demokrasi. Keadilan Sosial, yaitu keadilan yang merata pada seluruh rakyat yang meliputi: pendidikan, listrik dan air.

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Sadar atau tidak, pendidikan adalah sumber utama yang dijadikan sebagai tolak ukur apakah negara tersebut bisa menyejahterakan, melindungi serta memenuhi segala kebutuhan rakyatnya atau tidak, baik dalam mencukupi kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Tingkat pendidikan di Desa Kaera masih sangat rendah, hal ini dapat dilihat dari bebedapa faktor yaitu: Kemampuan ekonomi yang tidak mendukung, kurangnya infrastruktur yang memadai dan kurangnya tenaga pendidik.

Listrik sangat dibutuhkan oleh seluruh lapisan masyarakat, terutama masyarakat pedesaan. Berdasarkan data potensi desa (PODES) yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2014, masih terdapat sekitar 2.500 desa di Indonesia yang sama sekali belum menikmati akses tenaga listrik. Seperti yang di katakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral(ESDM) Ignasius Jonan bahwa listrik harus dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat dengan tarif yang terjangkau, termasuk bagi mereka yang tinggal dipedesaan. Desa Kaera merupakan desa yang jauh dari instalasi listrik PLN, sehingga hanya memanfaatkan genset diesel. Genset diesel ini sangat berdampak positif walau saat ini tidak beroperasi 24 jam, hanya menyala dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Meskipun genset diesel tidak beroperasi 24 jam, namun bisa membantu masyarakat saat malam.

Air bersih adalah salah satu kebutuhan primer manusia. Air begitu penting bagi kehidupan karena air merupakan salah satu prasyarat untuk mengukur kualitas hidup manusia. Walaupun air menjadi kebutuhan primer bagi manusia, sayangnya dinegeri kita, akses air bersih masih menjadi masalah besar, terutama didaerah-daerah terpencil, terkhususnya di daerah pedesaan.

Keadilan Ekonomi, yaitu suatu keadaan atau situasi dimana setiap orang memperoleh apa yang menjadi haknya yang meliputi : pendapatan, kepemilikan rumah dan tingkat pengeluaran untuk pendidikan. Pendapatan berarti hasil kerja (usaha dan sebagainya). Pendapatan juga merupakan sebuah hasil dari penjualan

produk atau jasa. Rumah adalah penentu fundamental bagi kehidupan layak, jaminan kesehatan, stabilitas keluarga dan kohesi sosial. Tinggi rendahnya pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan dapat dipengaruhi oleh karakteristik rumah tangga dan individu. Karakteristik rumah tangga antara lain pendidikan terakhir kepala rumah tangga, daerah tempat tinggal dan pendapatan, sedangkan karakteristik individu meliputi usia dan jenis kelamin anak. Orang tua yang berpendidikan tinggi akan cenderung memperhatikan pendidikan untuk anak. Mereka mengharapkan pendidikan anak yang lebih baik atau setara dengan pendidikan terakhirnya, begitupun sebaliknya. Pengeluaran rumah tangga untuk pendidikan di Desa Kaera dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu : pendapatan, jumlah anak, wilayah tempat tinggal, dan karakteristik kepala rumah tangga (pendidikan terakhir orang tua dan usia).

Keadilan demokrasi, yaitu demokrasi menempatkan posisi vital dalam kaitannya dengan pembagian kekuasaan dalam suatu negara dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Keadilan Demokrasi ini meliputi : rasa aman dan Akses informasi. Rasa aman merupakan kebutuhan dasar semua manusia dan hanya bisa didapatkan melalui sebuah hubungan yang penuh kehangatan dan dilandasi rasa percaya. Jika hal ini didapatkan maka akan membuat seseorang/individu merasa bahwa dirinya dicintai, diinginkan, dan dihargai. Akses informasi adalah kemudahannya yang diberikan kepada seseorang atau masyarakat untuk memperoleh informasi publik yang dibutuhkan.

Keterikatan ini karena program alokasi dana desa (ADD) salah satunya program yang dijalankan dengan baik dan berdampak signifikan untuk memajukan masyarakat dan kesejahteraan dalam bidang pembangunan, layanan fasilitas kesehatan, pendidikan serta bidang pemberdayaan lainnya disebuah desa disetiap kabupaten di Indonesia, khususnya di Desa Kaera Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor. Program ini juga diproses dan ditangani sepenuhnya secara swadaya oleh pemerintah desa dan tentunya masyarakat dan diharapkan alokasi dana desa yang dialokasikan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk pembangunan pedesaan secara bersama.

Oleh karena itu perlu diketahui sejauh mana akuntabilitas pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa dan sejauh mana peran dari Alokasi Dana Desa dalam program desa sehingga tujuan pemerintah pengalokasian Dana Pemerintah Pusat dan Daerah bisa membantu program desa mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban dalam pelaporannya harus dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku dan untuk tercapainya tujuan pemerintah demi kesejahteraan masyarakat.

Akuntabilitas dapat dimakanai sebagai perwujudan kewajiban aparat pemerintah desa dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan Dana Desa dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan agar dilaksanakan secara efisien, efektif, dan ekonomis Hasniati (2016). Akuntabilitas juga dapat diuraikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau badan kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu.

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Konsep pengaturan pemerintahan desa salah satunya adalah demokratisasi yang bermakna bahwa penyelenggaraan pemerintahan desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi melalui Badan Musyawarah Desa dan Lembaga kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa.

Desa juga memiliki peran yang sangat penting, khususnya dalam pelaksanaan tugas dibidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana dan prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa. Dengan diterbitkannya UU No. 6 tahun 2014 tentang desa, posisi pemerintah desa menjadi semakin kuat. Kehadiran Undang-Undang tentang desa tersebut disamping merupakan penguatan status desa sebagai pemerintahan masyarakat sekaligus juga sebagai basis untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk itulah pemerintah mengeluarkan kebijakannya itu melalui program alokasi dana desa (ADD) sebagai perwujudan dari desentralisasi keuangan menuju desa yang mandiri.

Alokasi dana desa mencakup amanah yang cukup besar dan tanggungjawab dari pihak yang berwenang dalam pengelolaannya, maka akuntabilitas pengelolaan keuangan harus dilakukan sebagai bentuk pengawasan dan kejelasan. Akuntabilitas yaitupertanggungjawaban suatu organisasi kepada khalayak umum. Dikatakan bertanggungjawab jika organisasi tersebut dapat mempertanggung jawabkan dan menjelaskan tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil. Tanggung jawab disertai dengan penjelasan dari setiap tindakan sehingga masyarakat dapat diberitahu dan dihukum jika terjadi ipenyalahgunaan.

Sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan Dana Desa Tahun Anggaran 2021, Dana Desa yang diterima dari APBN diperuntukkan bagi desa yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Penggunaan alokasi dana desa harus bermanfaat yang sebesar-besarnya dengan mengutamakan kegiatan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Pelaksanaan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana dalam proses perencanaan masyarakat, bersama-sama dengan aparat sesuai dengan ketentuan yang berlaku saat ini yang ditetapkan oleh pemerintah daerah, yaitu kebijakan desa (Hadi 2019).

Kelembagaan desa merupakan kumpulan orang-orang yang melakukan kerjasama, tergabung dalam lembaga/organisasi desa dan mempunyai tujuan serta mempunyai fungsi dalam menyokong, membantu pelaksanaan kewenangan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penelitian mengenai akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa terhadap kesejahteraan masyarakat yang telah dilakukan oleh Andar Sari dkk (2016) berpengaruh secara bersama-sama untuk kesejahteraan masyarakat. Hal yang berbeda dilakukan oleh Yuli Kurniawati dan Pangayow (2017) yang menunjukkan bahwa alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa tidak berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat.

Oleh karena itu peneliti tertarik meneliti mengenai program ini, dimana perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu ialah terkait lokasi penelitian, yang dimana penelitian ini dilakukan di Desa Kaera Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor. Peningkatan kesejahteraan masyarakat digunakan sebagai variable dependen sedangkan akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa, dan kelembagaan desa sebagai variable independen.

Diharapkan akuntabilitas pengelolaan keuangan yang baik, berjalannya fungsi kebijakan desa dan kelembagaan desa akan menimbulkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Desa Kaera dan menghilangkan kecurigaan yang timbul antar masyarakat terhadap pemerintah desa. Apabila alokasi dana desa dikelola dengan baik, efektifnya kebijakan desa dan kelembagaan desa dengan tujuan mengatasi permasalahan ekonomi dan kepentingan masyarakat terpenuhi dalam hal keadilan sosial, keadilan ekonomi dan keadilan demokrasi, maka desa akan lebih sejahtera dari sebelumnya dalam pembangunan pedesaan.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu serta fenomena yang dijelaskan sebelumnya, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaera Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor.

## **LANDASAN TEORI**

Kesejahteraan merupakan sejumlah kepuasan yang diperoleh seseorang dari hasil mengonsumsi pendapatan yang diterima. Namun demikian, tingkatan dari kesejahteraan itu sendiri merupakan sesuatu yang bersifat relatif karena tergantung dari besarnya kepuasan yang diperoleh dari hasil mengonsumsi pendapatan tersebut. Keterkaitan antara konsep kesejahteraan dan konsep kebutuhan adalah dengan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan tersebut, maka seseorang sudah dinilai sejahtera karena tingkat kebutuhan tersebut secara tidak langsung sejalan dengan indikator kesejahteraan. Indikator kesejahteraan tersebut meliputi: Pendapatan, Konsumsi/Pengeluaran Keuangan, Keadaan Tempat Tinggal, Fasilitas Tempat Tinggal, Kesehatan, Pendidikan dan pembangunan desa sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat.

Kesejahteraan merupakan titik ukur bagi masyarakat yang berarti bahwa telah berada pada kondisi yang sejahtera. Pengertian sejahtera itu sendiri adalah kondisi manusia dimana orang-orangnya dalam keadaan makmur, dalam keadaan sehat dan damai sehingga untuk mencapai kondisi itu orang tersebut memerlukan suatu usaha sesuai kemampuan yang dimilikinya.

Kesejahteraan masyarakat adalah suatu keadaan yang menunjukkan ukuran taraf hidup yang tercermin dalam standar kehidupan masyarakat. Memenuhi kebutuhan dasar yang tercermin dalam perumahan yang layak, kebutuhan sandang dan pangan yang memadai, biaya pendidikan dan kesehatan yang rendah, atau situasi dimana setiap orang dapat memaksimalkan kegunaannya dalam batas anggaran. Tidak mudah mencapai kesejahteraan, perlu program yang baik untuk menjalankannya. Salah satunya adalah program ADD. Program ini dirancang oleh pemerintah Indonesia untuk mempercepat pengentasan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan serta bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan kemandirian daerah pedesaan yang tertinggal.

Akuntabilitas berasal dari Bahasa Inggris yaitu “*Accountability*” yang berarti pertanggungjawaban atau keadaan untuk diminta pertanggung jawaban. Menurut Sukasmanto dalam Sujarweni (2015) menjelaskan bahwa akuntabilitas menyangkut kemampuan pemerintah desa mempertanggung jawabkan kegiatan yang dilaksanakan dalam kaitannya dengan masalah pembangunan dan pemerintahan desa.

Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa adalah pertanggung jawaban pemerintah desa dalam mengelola alokasi dana desa yang dilakukan berdasarkan prosedur, kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan desa (Supadmi dan Suputra, 2018).

Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa adalah kewajiban untuk memberikan pertanggung jawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan kepada bupati/erupa laporan dengan prinsip bahwa setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kristianto, dkk 2018).

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 pasal 1 angka 9 tentang pengelolaan keuangan Alokasi Dana Desa menjelaskan bahwa Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan Daerah (APBD) setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (DAK). Besaran penerimaan Alokasi Dana Desa diatur dalam perhitungan yang dibuat Pemerintah Kabupaten/Kota dengan memperhatikan tata cara yang telah diatur oleh Peraturan Pemerintah (PP) yang kemudian dituangkan dalam Peraturan Bupati/Wali Kota. Pengelolaan keuangan tersebut baik dari penganggaran hingga realisasi harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat atau perangkat desa itu sendiri.

Indikator Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa meliputi: Perencanaan, penyusunan, Pelaksanaan, Pengawasan, Pengendalian, Evaluasi dan Pertanggung jawaban.

Alokasi Dana Desa merupakan bagian dari keuangan desa yang didapatkan melalui Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah serta Hasil Pajak Daerah yang diterima oleh Kabupaten. Alokasi Dana Desa bersumber dari Dana Perimbangan Pemerintah Kabupaten/Kota yang berasal dari Pusat untuk diberikan kepada desa dengan nilai paling sedikit 10%. Alokasi Dana Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kebijakan Desa merupakan salah satu produk hukum karena setiap pemerintah desa secara hukum memiliki wewenang. Secara Undang-Undang, kebijakan formal di level tertua dalam bentuk peraturan desa dan secara struktur undang-undang dan ketatanegaraan. Peraturan desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa dan peraturan tersebut berlaku pada wilayah desa tertentu. Peraturan desa dilarang bertentangan dengan kepentingan umum dan masyarakat pun juga berhak memberikan masukan secara langsung atau tidak langsung dalam rangka penyiapan program rancangan peraturan desa.

Kebijakan adalah suatu ketentuan dan pedoman yang dianut dan ditentukan dalam melaksanakan suatu program atau kegiatan untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Dura (2016) kebijakan desa merupakan salah satu produk hukum karena

setiap pemerintah desa secara hukum memiliki hak atau wewenang meskipun berskala kecil yang mencakup wilayah administrasi desa itu sendiri. Kebijakan yang diambil merupakan pedoman dan ketetapan yang diambil untuk melaksanakan suatu rencana dalam mencapai tujuan tertentu.

Kelembagaan Desa merupakan kumpulan orang-orang yang melakukan kerja sama, tergabung dalam Lembaga/Organisasi Desa dan mempunyai tujuan serta mempunyai fungsi dalam menyokong, membantu kewenangan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Kelembagaan desa adalah kelompok-kelompok sosial yang menjalankan masyarakat dan dibangun untuk suatu fungsi tertentu. Lembaga atau institusi adalah wadah untuk mengemban tugas dan fungsi tertentu dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Oleh karena itu keberadaan kelembagaan desa merupakan wadah untuk mengemban tugas dan fungsi pemerintah desa.

Kelembagaan desa merupakan kelembagaan yang mendukung penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

Menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, terdapat enam Lembaga di desa, yakni: Pemerintah Desa (Kepala Desa dan Perangkat Desa), Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, Karang Taruna, LPM, Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW). Masing-masing lembaga desa tersebut memiliki kedudukan, tugas dan fungsi tertentu dalam konstruksi penyelenggaraan desa yakni :

1. Kedudukan suatu lembaga desa mencerminkan peran yang diemban oleh lembaga desa tersebut
2. Tugas dan kedudukan lembaga desa merupakan derivasi atau uraian lebih lanjut dari kewenangan desa, sehingga seluruh kewenangan desa dapat diselenggarakan secara efektif oleh lembaga-lembaga desa tersebut.

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Pemerintah Desa wajib mendayagunakan dan memberdayakan Lembaga Kemasyarakatan dan Lembaga Adat yang ada di Desa. Lembaga Kemasyarakatan merupakan wadah partisipasi masyarakat desa sebagai mitra pemerintah desa dalam membantu pelaksanaan fungsi Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini yang menjadi populasi dalam penelitian ini terdiri atas dua (2) kategori, yakni aparat desa dan masyarakat Desa Kera Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor. Kategori 1 Aparat desa terdiri atas perangkat desa 8 orang, BPD 7 orang, Kepala dusun 2 orang, ketua RW 4 orang, ketua RT 7 orang, ketua karang taruna 1 orang dan kategori 2 yakni masyarakat desa sebanyak 233 KK. Teknik pengambilan sampel yang diambil ada dua, yaitu sampel jenuh dan cluster random sampling. Dalam penarikan sampel, dibagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori 1 aparat desa, menggunakan sampel jenuh, yakni semua populasi dijadikan sampel. Kategori 2 yaitu masyarakat desa, menggunakan cluster random sampling, yakni populasi yang ada di dibagi dalam beberapa area yang lebih kecil dan jelas batas-batasnya, maka populasi masyarakat desa diambil sebanyak 46 orang sebagai

sampel. Uraian mengenai jumlah sampel dalam penelitian ini dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 1**  
**Sampel Penelitian**

No	Karakter Populasi	Jumlah
1	Aparat Desa	30 Orang
2	Masyarakat Desa	46 Orang
Jumlah	Jumlah Sampel	76 Orang

Sumber : Hasil Olahan data penelitian (2023)

Dalam penelitian ini, jenis data yang digunakan adalah data primer. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari penyebaran angket/kuesioner, yaitu merupakan teknik pengumpulan data menggunakan cara memberikan pertanyaan atau pernyataan kepada responden untuk dijawab. Data dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpulan data berupa angket (kuesioner). Kuesioner adalah daftar pernyataan atau pernyataan yang diberikan kepada responden untuk menggali data sesuai dengan permasalahan penelitian.

Teknik analisis data dilakukan dua analisis yaitu analisis pendahuluan dan analisis lanjutan. Teknik analisis pendahuluan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik statistik deskriptif, digunakan untuk memberikan gambaran tentang identitas responden yang terdiri atas umur, jenis kelamin. Dalam analisis ini peneliti juga menganalisis data-data yang dikumpulkan untuk dideskripsikan dan analisis yang dipakai adalah regresi linear berganda. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data adalah penyebaran angket/kuesioner kepada 76 orang pemerintah desa di Desa Kaera Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor. Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran tentang identitas responden yang terdiri atas nama, umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan deskripsi jawaban responden yang kemudian dijabarkan dalam bentuk tabel dan nilai persentasinya.

Hipotesis penelitian adalah: (1) Akuntabilitas pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaera Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor. (2) Kebijakan Desa berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaera Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor. (3) Kelembagaan Desa berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaera Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor.

## **HASIL PENELITIAN**

### 1. Hasil Uji Kuesioer

Hasil uji validitas dan reliabilitas untuk masing-masing variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

#### 1.1. Hasil Uji Validitas Variabel

##### 1.1.1. Hasil uji validitas variable akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (X1)

Hasil uji validitas akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa (X1) dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 1**

**Hasil Uji Validitas Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana  
Desa (X<sub>1</sub>)**

Pernyataan	Pearson Correlation	Batas Validitas	Keterangan
P1	0,808	0,3	Valid
P2	0,763	0,3	Valid
P3	0,778	0,3	Valid
P4	0,865	0,3	Valid
P5	0,893	0,3	Valid
P6	0,781	0,3	Valid
P7	0,866	0,3	Valid

Sumber: Data Penelitian SPSS 22 For Windows 2023

Berdasarkan hasil validitas variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa seperti terlihat dalam tabel diatas diketahui nilai *r* hitung (*Pearson Correlation*) untuk semua item pernyataan lebih besar dari 0,3. Dengan demikian, maka seluruh item pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa bagi kesejahteraan masyarakat Desa Kaera Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor.

1.1.2. Hasil Uji Validitas Variabel Kebijakan Desa (X<sub>2</sub>)

Hasil Uji Validitas Variabel Kebijakan Desa (X<sub>2</sub>) dapat dilihat pada tabel ini:

**Tabel 2**  
**Hasil Uji Validitas Kebijakan Desa (X<sub>2</sub>)**

Pernyataan	Pearson Correlation	Batas Validitas	Keterangan
P1	0,746	0,3	Valid
P2	0,779	0,3	Valid
P3	0,763	0,3	Valid
P4	0,924	0,3	Valid
P5	0,591	0,3	Valid
P6	0,849	0,3	Valid
P7	0,924	0,3	Valid

Sumber: Data Penelitian SPSS 22 For Windows 2023

Berdasarkan hasil validitas variabel Kebijakan Desa seperti terlihat dalam tabel diatas diketahui nilai *r* (*hitung Pearson Correlation*) untuk semua item pernyataan lebih besar dari 0,3. Dengan demikian, maka seluruh item pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh variabel Kebijakan Desa bagi kesejahteraan masyarakat Desa Kaera Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor.

1.1.3. Hasil Uji Validitas Variabel Kelembagaan Desa (X<sub>3</sub>)

Hasil Uji Validitas Variabel Kelembagaan Desa (X<sub>3</sub>) dapat dilihat pada tabel ini :

**Tabel 3**  
**Hasil Uji Validitas Kelembagaan Desa (X<sub>3</sub>)**

Pernyataan	Pearson Correlation	Batas Validitas	Keterangan
P1	0,441	0,3	Valid
P2	0,785	0,3	Valid
P3	0,500	0,3	Valid
P4	0,570	0,3	Valid
P5	0,709	0,3	Valid
P6	0,431	0,3	Valid
P7	0,767	0,3	Valid

Sumber: Data Penelitian SPSS 22 For Windows 2023

Berdasarkan hasil validitas variabel Kelembagaan Desa seperti terlihat dalam tabel diatas diketahui nilai  $r$  (*hitung Pearson Correlation*) untuk semua item pernyataan lebih besar dari 0,3. Dengan demikian, maka seluruh item pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh variabel Kelembagaan Desa bagi kesejahteraan masyarakat Desa Kaera Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor.

1.1.4. Hasil Uji Validitas Variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y)

Hasil Uji Validitas Variabel Kesejahteraan Masyarakat (Y) :

**Tabel 4**  
**Hasil Uji Validitas Kesejahteraan Masyarakat (Y)**

Pernyataan	Pearson Correlation	Batas Validitas	Keterangan
P1	0,629	0,3	Valid
P2	0,611	0,3	Valid
P3	0,641	0,3	Valid
P4	0,688	0,3	Valid
P5	0,609	0,3	Valid
P6	0,567	0,3	Valid
P7	0,622	0,3	Valid

Sumber: Data Penelitian SPSS 22 For Windows 2023

Berdasarkan hasil validitas variabel Kesejahteraan Masyarakat seperti terlihat dalam tabel diatas diketahui nilai  $r$  (*hitung Pearson Correlation*) untuk semua item pernyataan lebih besar dari 0,3. Dengan demikian, maka seluruh item pernyataan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh variabel Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaera Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor.

1.2. Hasil Uji Reliabilitas

Hasil Uji reliabilitas penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 5**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach Alpha	Batas Reliabilitas	Keterangan
Akuntabilitas Pengelolaan	0,917	0,6	Reliabel

Keuangan Alokasi Dana Desa (X <sub>1</sub> )			
Kebijakan Desa (X <sub>2</sub> )	0,901	0,6	Reliabel
Kelembagaan Desa (X <sub>3</sub> )	0,692	0,6	Reliabel
Kesejahteraan Masyarakat (Y)	0,723	0,6	Reliabel

Sumber : Data Peneliti Olahan SPSS 22 For Windows 2023

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa nilai Cronbach Alpha setiap variabel yang digunakan dalam penelitian ini lebih besar dari 0,6 dengan demikian maka hasil yang didapat dalam perhitungan ini yaitu semua variabel memiliki nilai reliabel dan dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik.

## 2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Tujuan dilakukan uji asumsi klasik adalah untuk mendapatkan model regresi tidak biasa sesuai dengan kaidah uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multi kolinearitas, uji heterokedastisitas dan uji linearitas.

### 2.1. Hasil Uji Normalitas

Hasil Uji normalitas pada penelitian ini sebagai berikut :

**Tabel 6**  
**Hasil Uji Normalitas**

		Unstandardized Residual
N		76
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.24967918
Most Extreme Differences	Absolute	.091
	Positive	.091
	Negative	.070
Test Statistic		.091
Asymp. Sig. (2-tailed)		.198 <sup>o,d</sup>

Sumber: Data Peneliti Olahan SPSS 25 For Windows 2023

Berdasarkan tabel diatas, hasil uji normalitas yang dibuktikan dengan hasil uji one sampel kolmogorov smirnov test diketahui nilai Asymp. Sig (2-tailed) sebesar 0.091 pada signifikansi 0,198 Asymp. Sig. (2-tailed), artinya dapat disimpulkan bahwa residul terdistribusi secara normal, karena p value > 0,05.

### 2.2. Uji Heterokedastisitas

Hasil uji heterokedastisitas sebagai berikut :

**Tabel 7**  
**Uji Heterokedastisitas (uji glejser)**

		Standardized Coefficients		

Model	Unstandardized Coefficients		Beta	t	Sig.
	B	Std. Error			
1 (Constant)	.76	2.99	.161	.256	.79
X1	.06	.062	.111	1.11	.26
X2	.09	.053	.186	.931	.35
X3	.04	.081		1.27	.20
	.10				

Sumber : Data Peneliti Olahan SPSS 22 For Windows 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat dari hasil uji heterokedastisitas menggunakan uji glejser diketahui bahwa nilai signifikan pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa lebih besar dari 0,05 atau 5%. Maka variabel independent dalam penelitian ini tidak terjadi heterokedastisitas.

2.3. Uji Multikolinieritas

Hasil Uji multikoliaritas sebagai berikut :

**Tabel 8**  
**Uji Multikolinieritas**

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error				Tolerance	VIF
1 (Constant)	14.539	5.04	.882	2.882	.005	.64	1.562
X1	.05	.104	.067	.494	.623	.4	.552
X2	.02	.089	.287	.2	.013	.7	.056
X3	.27	.137	.333	.545	.013	.7	.056
	.32			.2			
	.09			.401	.019	.7	.596

Sumber : Data Peneliti Olahan SPSS 22 For Windows 2023

Berdasarkan tabel diatas, dapat dilihat dari hasil uji multikolinieritas pada variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa memperoleh nilai tolerance diatas nilai batas yaitu 0,1, demikian juga variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa memperoleh nilai VIF dibawah nilai batas yaitu 10, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi multikolinieritas dalam penelitian ini.

2.4. Uji Linearitas

Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah variabel terikat dengan variabel bebas memiliki hubungan yang liner atau tidak secara signifikan.

**Tabel 9**  
**Hasil Uji Linearitas**

Combine d (Deviation from Linearity)	Sum of Square	d f	Mean Square	f	Sig
Y*X1	3.198	1	3.198	.545	.463
Y*X2	21.536	1	21.536	3.632	.061
Y*X3	22.623	1	22.623	3.791	.056

Sumber : Data Peneliti Olahan SPSS 22 For Windows 2023

Berdasarkan hasil uji linearitas pada tabel diatas menunjukkan bahwa nilai deviation from linearity dari tiap perkalian antara variabel kesejahteraan masyarakat dengan variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa mendapatkan nilai signifikansi dari uji f dengan nilai diatas dari nilai alfa 0,5 atau 5%. Dengan demikian maka variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa mempunya hubungan yang linear dengan kesejahteraan masyarakat.

### 3. Analisis Lanjutan

#### 3.1. Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa, terhadap variabel terikat yaitu Kesejahteraan Masyarakat Desa Kaera Kecamatan Pantar Timur Kabupaten Alor.

**Tabel 10**  
**Hasil Uji Regresi Linier Berganda**

Model	Unstandarized Coefficients		Unstandarized Coefficients	t	Sig
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14.539	5.045		.832	.005
X1	.051	104	.067	.494	.623
X2	.227	089	.287	.545	.013
X3	.329	137	.333	2.401	.019

Sumber: Data Peneliti Olahan SPSS 22 For Windows 2023

Berdasarkan hasil analisis data pada tabel diatas, diperoleh persamaan regresi linear berganda sebagai berikut :  $Y = 14.539 + 0,051X_1 + 0,227X_2 + 0,329X_3 + e$

Dari hasil persamaan regresi tersebut diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Berdasarkan persamaan regresi linier berganda, nilai konstanta kesejahteraan masyarakat sebesar 14.539 artinya jika variable independent sama dengan 0 maka kesejahteraan masyarakat adalah sebesar 14.539 dengan asumsi variable-variabel lain yang dapat mempengaruhi kesejahteraan masyarakat dianggap tetap.
2. Nilai koefisien regresi variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa ( $X_1$ ) sebesar 0,051, nilai ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan variabel  $X_1$  sebesar 1 satuan akan mengakibatkan variabel Kesejahteraan Masyarakat mengalami peningkatan sebesar 5,1% dengan ketentuan variable bebas yang lain adalah 0 atau konstan
3. Nilai koefisien regresi variabel Kebijakan Desa ( $X_2$ ) sebesar 0,227, nilai ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan variabel  $X_2$  sebesar 1 satuan akan mengakibatkan variabel Kesejahteraan Masyarakat mengalami peningkatan sebesar 22,7% dengan ketentuan variable bebas yang lain adalah 0 atau konstan
4. Nilai koefisien regresi variabel Kelembagaan Desa ( $X_3$ ) sebesar 0,329, nilai ini mengandung arti bahwa setiap kenaikan variabel  $X_3$  sebesar 1 satuan akan mengakibatkan variabel Kesejahteraan Masyarakat mengalami peningkatan sebesar 32,9%. dengan ketentuan variable bebas yang lain adalah 0 atau konstan.

### 3.2. Pengujian Hipotesis

#### 3.2.1. Uji T (Uji Parsial)

Hasil Uji t penelitian ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 11**  
**Hasil Uji Parsial (Uji t)**

Model	Unstandarized Coefficients		Unstandardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14.539	5.045		.832	.005
Akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa	.051	.104	.067	.494	.623
Kebijakan desa	.227	.089	.287	.545	.013
Kelembagaan desa	.329	.137	.333	2.401	.019

Sumber: Data Peneliti Olahan SPSS 22 For Windows 2023

Berdasarkan pada tabel 4.21 diatas, maka hasil analisis uji t adalah sebagai berikut:

1. Variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa ( $X_1$ ) tidak berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan uji statistik melalui uji t dengan taraf nyata 5% dimana memiliki nilai probabilitas sebesar  $0,623 > 0,05$  atau 5%. Hal ini berarti bahwa variabel Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat,  $H_0$  ditolak.
2. Variabel Kebijakan Desa ( $X_2$ ) berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan uji statistik melalui uji t dengan taraf nyata 5% dimana memiliki nilai probabilitas sebesar  $0,013 < 0,05$  atau 5%. Hal ini berarti bahwa variabel Kebijakan Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat,  $H_0$  diterima.
3. Variabel Kelembagaan Desa ( $X_3$ ) berpengaruh signifikan terhadap Kesejahteraan Masyarakat dengan uji statistik melalui uji t dengan taraf nyata 5% dimana memiliki nilai probabilitas sebesar  $0,019 < 0,05$  atau 5%. Hal ini berarti bahwa variabel Kelembagaan Desa berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat,  $H_0$  diterima.

### 3.2.2. Uji F (Simultan)

Hasil uji F penelitian ini adalah sebagai berikut:

**Tabel 12**  
**Hasil Uji F (Simultan)**

Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	f	Sig
Regression	14.539	3	19.48	3.69	.016
Residual	379.579	7	5.272	6	b
Total	438.039	10			

Sumber : Data Peneliti Olahan SPSS 25 For Windows 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui nilai signifikan uji f untuk pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa ( $X_1$ ), Kebijakan Desa ( $X_2$ ), dan Kelembagaan Desa ( $X_3$ ) terhadap Kesejahteraan Masyarakat ( $Y$ ) adalah sebesar  $0,016 < 0,05$  atau 5%. Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima, yang berarti terdapat pengaruh bersama-sama (simultan) variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa, kebijakan desa dan kelembagaan desa terhadap variabel kesejahteraan masyarakat.

## KESIMPULAN

Berdasarkan seluruh rangkaian analisis data, maka kesimpulan sebagai berikut:

1. Secara parsial variable Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa ( $X_1$ ) tidak berpengaruh terhadap Kesejahteraan Masyarakat ( $Y$ ) yang dibuktikan dengan nilai sig sebesar 0,623, artinya bahwa hipotesis tersebut ditolak
2. Secara parsial, variable Kebijakan Desa ( $X_2$ ) berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat ( $Y$ ), yang dibuktikan dengan nilai sig sebesar 0,013, artinya bahwa variable tersebut diterima.

3. Secara parsial, variable Kelembagaan Desa (X3) berpengaruh positif terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y), yang dibuktikan dengan nilai sig sebesar 0,019, artinya bahwa variable tersebut diterima.
4. Secara simultan, variable Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa (X1), Kebijakan Desa (X2) dan Kelembagaan Desa (X3) berpengaruh secara bersama-sama (simultan) terhadap variable Kesejahteraan Masyarakat yang dibuktikan dengan nilai sig sebesar 0,016, artinya bahwa variable tersebut diterima.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Apriliani. (2014). Pengaruh akuntabilitas pengelolaan keuangan alokasi dana desa di desa Kedungharjo Kecamatan Muncar Kabupaten Banyuwangi Tahun 2013. Diambil kembali dari <http://repository.unej.ac.id/handle/123456789/61025>.
- Buku panduan Teknik penulisan proposal dan skripsi/program studi manajemen/fakultasekonomi/universi tastribuana kalabahi.
- Dura, J. (2016) Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Pada Desa Gubuklakah Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang). *Jurnal Jibeka*,10(1).
- Emiliya, L. (2019). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi*. Vol.8
- Firdaus, F., Yufrinalis, M., Fil, S., Putri, R., Supriyanto, S. A. B., Peny, T. L., ...& ArdiAfrizal, S. E. (2021). *Metodologi Penelitian Ekonomi*. Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Indrawati Rina. S. (2017). "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa terhadap kesejahteraan masyarakat." *Jurnal Akuntansi* vol.12 No.2 November 2017.
- Juita, L. Y. (2016). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa Dan Kelembagaan Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pada Nagari Sungai Tanang Kecamatan Banuhampu Kabupaten Agam. *Jurnal Akuntansi*.
- Nafidah. (2017). "Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Desa, Kebijakan Desa, Kelembagaan Desa terhadap kesejahteraan masyarakat." *Jurnal Akuntansi* vol.12 No.2 November 2017.
- Sumarni, M. (2020). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa, Kebijakan Desa, dan Kelembagaan Desa terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Ekonomi*.
- Tang, S. A., Maro, Y., Gorang, A. F., & Maruli, E. (2022). Pengaruh Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 8(21), 384-399.
- Yuli Kurniawati dan Bill J.C. Pangayouw S.E., M. (2017). Pengaruh Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Alokasi Dana Kampung, Kebijakan 74 Kampung dan Kelembagaan Kampung Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Akuntansi & Keuangan Daerah*, vol 12.